

Profil Hj. Hastinah Amir: Perempuan Sang Pengabdikan untuk Rakyat dan Daerah

Online Journal System (OJS):
ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB

Ashari 

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Abstrak: Perempuan dalam perannya, tidak hanya dalam wilayah domestik, tetapi juga subyek urgen dalam melakukan peran-peran yang strategis di dunia publik. Kehadiran perempuan di kancah publik, tidak semata sebagai sebagai “pengikut, pelengkap, atau penikmat”, tetapi mereka adalah “pemimpin, pelaku, dan produsen”, pembangunan. Riset ini, adalah telaah pustaka sosio historis, dengan merujuk penuh pada hasil riset peneliti. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hj. Hastinah Amir, adalah sosok sang pengabdikan untuk rakyat dan daerah, kiprah-kiprahnya demikian mengakar dalam masyarakat. Hj. Hastinah, memiliki latar belakang sebagai pendidik, dan kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten Pangkep. Idenya, berupaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender, pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Gambaran kiprah Hj. Hastinah Amir, menjadi “spirit”, dalam hidup terutama, bagi perempuan-perempuan daerah.

Kata Kunci: profile, perempuan, sang pengabdikan

Abstract: *Women in their role, not only in the domestic area, but also urgent subjects in performing strategic roles in the public world. The presence of women in the public arena is not merely as ‘followers, complements, or enjoyers’, but they are ‘leaders, actors, and producers’ of development. This research is a socio-historical literature review, with full reference to the results of the researcher's research. The results of the study show that Hj Hastinah Amir is a servant of the people and the region, whose work is deeply rooted in society. Hastinah has a background as an educator, and later became a member of the Pangkep Regency DPRD. The idea is to fight for gender equality, development in various fields of life, economy, politics, law and culture. The description of Hj. Hastinah Amir's work becomes a ‘spirit’ in life, especially for regional women.*

Keywords: profile, women, the servant

*Received Januari 2025; accepted Maret 2025

Corresponding author:

Ashari, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri
Makassar, Indonesia.

Email: ashariismail272@gmail.com

Pendahuluan

Perempuan dalam dunia politik memiliki berbagai tantangan yang harus dihadapi, tantangan tersebut tentu bukan tantangan yang ringan melainkan tantangan yang cukup berat. Tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik berupa akses yang dibatasi dan representasi yang sangat minim. Budaya patriarki juga menjadi salah satu tantangan yang besar bagi keikutsertaan perempuan dalam dunia politik. Dalam budaya patriarki laki-laki dianggap hanya mereka yang dapat atau pantas memegang posisi pemimpin (Nursyifa, Tamala, Zakiah, Rachmani, & Mutmainnah, 2023). Selain itu *image* perempuan dalam sektor politik menunjukkan bahwa perempuan tidak layak untuk memimpin karena perempuan lebih mengandalkan emosi dibanding logika (Astuti, 2008). Anggapan masyarakat terhadap perempuan bahwa perempuan tidak pantas masuk ke dunia politik dan tempat perempuan hanya dapur dan rumah (Adriani, & Maulia, 2024). Aturan-aturan telah dikeluarkan agar perempuan mendapatkan ruang dalam dunia politik, namun pada faktanya partisipasi perempuan dalam ranah politik dapat dikatakan masih sangat rendah. Partisipasi perempuan yang rendah disebabkan oleh tantangan-tantangan kultural, struktural dan stereotip gender yang memandang rendah perempuan (Fauziah, Rizki, & Ramdani, 2023).

Rendahnya partisipasi perempuan dalam ranah politik memberikan dampak terhadap perempuan seperti kepentingan-kepentingan perempuan yang kurang dikemukakan atau diperjuangkan, keputusan politik yang berat sebelah dimana perempuan dijadikan pilihan kedua (Wahyudi, 2018). Walaupun partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah tidak sedikit juga figur-figur perempuan yang dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat dan sudah sangat banyak perempuan yang sudah berani mengekspresikan pendapat di ruang publik (Kiftiyah, 2019). Salah satu sosok perempuan yang inspiratif adalah Hj. St. Hastinah Amir. Seorang perempuan yang berasal dari Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Beliau telah menunjukkan berbagai komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama pada kaum perempuan.

Hj. Hastinah Amir masuk kedalam dunia politik dimulai saat beliau terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkep di tahun 1999. Kemudian terpilih kembali pada tahun 2004. Pada periode kedua ini Hj. Hastinah Amir terus melanjutkan perjuangan dalam dunia politik. Perjuangan ini dilakukan dengan tujuan terhadap kepentingan rakyat, terutama menyerukan dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dapat dilakukan oleh perempuan, serta pembangunan daerah agar lebih maju. Hj. Hastinah Amir sering kali menegaskan bahwa motivasi utama dalam mengemban tanggung jawab menjadi anggota DPRD adalah aspirasi utama masyarakat terutama perempuan yang harus diperjuangkan. Menurut Hj. Hastinah Amir, perempuan dalam politik bukan hanya sebagai wakil simbolik melainkan juga pengabdian dan tanggung jawab yang memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki. Artikel ini ingin menjelaskan lebih lanjut tentang profil Hj. Hastinah Amir sebagai tokoh perempuan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat terutama perempuan.g.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode sosio historis. Metode penelitian dengan telaah pustaka, secara sosio historis, artinya kajian dengan merekonstruksi realitas histories dan realitas sosiologis. Telaah, di fokuskan, pada riset penulis sebelumnya, dengan menggabungkan teknik dan analisis kajian sosiologis dan sejarah. Telah dilakukan dengan kemudian akan di paparkan secara sistematis. Dengan pendekatan ini menjelaskan gagasan ketokohan, dalam dinamika kedirian perempuan. Konsep dan data digunakan dalam riset ini, adalah bagian dari temuan riset –dan kemudian direkonstruksi sebagai analisa sosiohistories, dari profile sang Tokoh.

Hasil dan Pembahasan

Profil dari Ibu Hj. St. Hastinah adalah perempuan putri kelahiran Pangkajene, pada 10 Mei 1943. Suaminya bernama H. Amir Tega adalah pensiunan PNS. Dia dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu: Dra. Hj. Anggraini, Muh. Hokey, S.Sos, Ir. Ariani, Nugraha, Sri Rejeki. S.Pd. Murbarini, ST. Saat penulis melakukan riset, menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD kabupaten Pangkep, tinggal di Jl. Leang Kassi No.36 Minasatene.

Hj. Hastina Amir, pernah mengenyam pendidikan pada SR No. 1 Pangkajene 1952, SGB 4 1960, SLTA Amanagapa, 1963. jabatan sebelumnya yang pernah dijabat sebelum menjadi anggota DPRD adalah : Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah Dasar. Selain itu, iapun aktif dalam berbagai organisasi yaitu: Partai Golongan Karya, HWK, dan KPPG. Nampaknya, setumpuk organisasi inilah yang menempah Ibu Hastinah untuk aktif memperjuangkan kaumnya di DPRD. Demikian perhatian terhadap persoalan kemasyarakatan sehingga Presiden Soeharto pernah memberi penghargaan KB Lestari kepadanya.

Hj. Hastina Amir telah menjadi anggota DPRD pada 1999, berarti terpilihnya menjadi anggota DPRD pada pemilu 2004 adalah jabatan sebagai anggota legislatif --- kedua kalinya. Menurutnyanya bahwa motivasi utamanya menjadi anggota DPRD adalah: menyalurkan aspirasi masyarakat terutama keinginan dan harapan kaum perempuan. Dalam hal ini cukup dimengerti bahwa keberadaan Ibu Hj. Hastina Amir sebagai anggota dewan adalah mengemban amanah kaumnya - perempuan Pangkep. Suatu amanah yang diyakini sebagai lahan perjuangan. Menurut Ibu Hj. Hastina Amir bahwa Indonesia Baru yang perlu diagendakan adalah agar dapat keluar dari krisis adalah Indonesia Baru yang bebas dari KKN, mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengawasan terhadap bantuan dan subsidi pemerintah agar benar-benar dapat sampai ke masyarakat. Dalam kaitan ini, terkhusus untuk kabupaten Pangkajene Kepulauan hal yang perlu ditata dan dikedepankan pembangunan daerah yang bernuansa Indonesia baru yaitu: Perlunya pembangunan yang berkaitan langsung dengan masyarakat dengan membangun jalan desa dan sarana kesehatan termasuk air bersih.

Dalam hal lain, Hj. Hastina Amir memandang bahwa dalam kaitannya dengan kesetaraan gender maka perlunya mengusulkan balai latihan kerja bagi remaja putri putus sekolah agar memiliki keterampilan untuk berusaha mandiri. Demikian pula unsur politis perlunya banyak memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk menyalurkan aspirasi pada organisasi politik. Demikian pula dalam agendanya Hj. Hastina Amir memandang perlunya mendorong berdirinya koperasi rakyat yang dikelola oleh kaum wanita terutama mengelola sembilan bahan pokok. Secara sosial, hukum dan budaya, Hj. Hastina Amir pula dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan memandang perlunya: pembangunan Panti Asuhan dan pembinaan bagi wanita-wanita yang bergelut pada kegiatan kafe terutama pada malam hari. Demikian pula, perlunya adanya suatu lembaga hukum atau bantuan hukum bagi kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya terutama dalam menghadapi berbagai kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal lain pula, Hj. Hastina Amir mengharapkan perlunya mengangkat kembali kesenian daerah yang berlatar belakang adat istiadat budaya bangsa sebagai perbandingan dan menjaring budaya yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran.

Indonesia dalam giatnya dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka menurut Ibu Hj. Hastina Amir langkah penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengawasan terhadap instansi yang rawan KKN dan mengadakan rapat kerja secara kontinyu dan berkesinambungan. Jelasnya dalam pandangan Ibu Hj. Hastina Amir, pengawasan adalah hal vital dalam mengontrol setiap pemanfaatan aset-aset negara. Tentu pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang melekat dan mengutakan kontrol yang membangun. Lebih jauh menurut Hj. Hastina Amir, bahwa

Visi/orientasi pembangunan kesetaraan gender yang harus diperhatikan adalah pemberian kesempatan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan potensi yang diberikan dan perlunya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkarya pada organisasi politik dengan menempatkannya pada posisi yang lebih bertanggung jawab. Demikian pula orientasi/visi ekonomi, Hj. Hastina Amir memahami perlunya pembinaan terhadap para perempuan melalui organisasi wanita yang bergerak dalam bidang ekonomi.

Dalam hal budaya dan hukum, orientasi/visi Hj. Hastina Amir memandang bahwa eksekutif perlu mengadakan pembinaan bagi kelompok-kelompok atau sanggar seni yang ada dan dilibatkan pada acara-acara nasional, pembangunan lembaga bantuan hukum bagi para wanita, sebagai sarana konultasi dan sebagai payung perlindungan. Demikian pula dalam visi/orientasi religiitas perlunya memberi kesempatan bagi kaum wanita dengan tidak memandang kodrat perempuan sebagai kaum lemah dengan tentu berdasarkan pada tata nilai keagamaan. Dalam pandangan yang lebih tegas, Hj. Hastina Amir menyatakan bahwa pada masa Orde Baru, terjadi distorsi dalam kesetaraan gender, hal ini menurutnya dimungkinkan oleh kesempatan yang tidak terbuka lebar dan juga kaum perempuan belum berani memasuki dunia politik. Demikian pula jaringan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan sampai ke tingkat desa belum mampu berperan sebagai kekuatan sosial-nanti masa reformasi baru nampak keterwakilan kaum perempuan pada jalur politik dan pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender yang dikaitkan dengan moralitas yang harus dibangun agar keluar dari krisis moral, maka yang diperlukan adalah melepas sedikit demi sedikit ketergantungan pada kaum pria dengan mengandalkan potensi SDM yang ada bukan dengan modal kecantikan semata. Demikian pula penciptaan suatu -style government atau accountable government adalah hal yang perlu dilakukan adalah dengan berani menyampaikan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Selain dari hal diatas, dalam kaitannya dengan otonomi daerah menurut Hj. Hastina Amir ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kesetaraan gender: (1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia kaum wanita melalui diklat, seminar; (2) Menyatukan persepsi wanita melalui organisasi untuk senantiasa melakukan komunikasi dan memberi kontribusi bagi pemerintah daerah; (3) Kontrol langsung ke desa-desa dan berdialog dengan semua lapisan masyarakat; dan (4) Menyerap aspirasi masyarakat — terutama dari kaum wanita dan mengkolaborasi dan berkoordinasi dengan eksekutif.

Kesimpulan

Profil Hj. St. Hastinah Amir menunjukkan bahwa perempuan dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan sosial-politik, khususnya di daerah. Dengan latar belakang sebagai pendidik dan aktivis organisasi, serta pengalaman dua periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkep, beliau menjadi contoh nyata perempuan yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama kaum perempuan. Gagasan dan agenda perjuangannya mencakup isu kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Dalam pandangannya, pemberdayaan perempuan harus melibatkan penguatan kapasitas, akses terhadap politik, ekonomi, hukum, serta pengawasan terhadap kebijakan publik. Hj. Hastinah juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral, budaya, dan religiusitas dalam pembangunan masyarakat. Keseluruhan kiprah dan pemikirannya memperlihatkan bahwa keberadaan perempuan dalam politik bukan hanya simbolik, tetapi merupakan kekuatan substantif yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perubahan dan kemajuan daerah.

Referensi

- Adriani, S., & Maulia, S., T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*. 4(2). 131-136.
- Astuti, T., M., P. (2008). Citra Perempuan dalam Politik. *YINYANG Jurnal Studi Gender dan Anak*. 3(1). 3-16.
- Fauziah, M., N., Rizki, M., F., & Ramdani, R. (2023). Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. 49(1). 12-22.
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *YINYANG Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*. 14(1).
- Nursyifa, A., Tamala, O., T., Zakiah, R., Rachmani, S., A., & Mutmainnah, M., S. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*. 9(1). 25-35
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Poolitea : Jurnal Politik Islam*. 1(1). 63-83.